

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

2023



**PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

PESAN PIMPINAN



“Mewujudkan Good Governance mendorong kapasitas memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat”.



“Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi pijakan utama yang diwujudkan secara kontinu oleh segenap pemangku kepentingan”.



Kata Pengantar

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

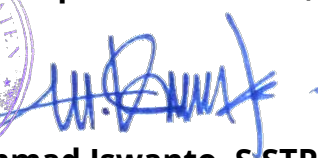
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatnya dan pertolongan-nya sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun 2023, sebagaimana telah diamatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kualitatif, wujud akuntabilitas pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Aceh Besar menuju terwujudnya Good Governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 secara substansi menjabarkan rencana kinerja tahunan, evaluasi dan uraian analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan informasi yang utuh atas upaya yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026.

Hasil Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Aceh Besar tidak terlepas dari partisipasi aktif dari semua pihak, baik elemen elemen pemerintah, masyarakat dan segenap stakeholder yang terkait didalamnya guna perumusan kebijakan, implementasi hingga tercapainya pengawasan yang akuntabel.

Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan kinerja maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di masa yang akan datang.

Kota Jantho, 15 Maret 2024
Pj. Bupati Aceh Besar,

Muhammad Iswanto, S.STP, MM





Daftar Isi

- I Pesan Pimpinan
- II Kata Pengantar
- III Daftar Isi
 - 1 Pendahuluan
 - 11 Perencanaan Kinerja
 - 33 Akuntabilitas Kinerja
 - 83 Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah Populasi Kabupaten Aceh Besar adalah 414.490 Jiwa dengan jumlah Laki-laki 209.017 Jiwa dan Perempuan 205.473 Jiwa. Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah yang berjumlah 55.410 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Leupung yaitu sebanyak 3.560 jiwa. tahun 2022 yang paling banyak berada pada selang umur 10-14 Tahun yaitu berjumlah 39.428 jiwa.

Kecamatan Darul Imarah ternyata menjadi Kecamatan terpadat dengan jumlah penduduk 2.275 jiwa/Km² sedangkan Kecamatan Leupung yang menjadi Kecamatan terjarang penduduknya dengan jumlah 21 jiwa/Km² (dengan kepadatan rata-rata Kabupaten Aceh Besar 142 jiwa/Km²). Sehingga rata-rata laju pertumbuhan penduduk pertahun 2021-2022 (1,20 %).



Pada tahun 2022, Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Aceh Besar ada sebanyak 211, 645 jiwa dan jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 112,433 Jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut , sebanyak 91,72% berstatus bekerja, sedangkan 8,28% merupakan pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.



Sumber. Profil Pembangunan Aceh Besar 2023

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dijabat oleh Pejabat Bupati sampai dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024. Dalam melaksanakan tugasnya, Pj. Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah beserta jajaran di bawahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Perangkat Daerah, pada tahun 2018 Kabupaten Aceh Besar telah menyusun dan membentuk kembali perangkat daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah, maka itu Organisasi Perangkat Daerah dalam Kabupaten Aceh Besar yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan
3. Inspektorat
4. Dinas Daerah

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menangani urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 5 (lima) dinas yaitu :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Dinas Kesehatan;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah; dan
- 4) Dinas Sosial.

| DINAS | | BADAN | | SEKRETARIAT | | 23 KECAMATAN | |
|-------|--|-------|--|-------------|--|--------------|---------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat | 1 | Ujung |
| 2 | Dinas Kesehatan | 2 | Badan Pengkaji Keuangan Daerah, dan | 2 | Sekretariat Majelis Aceh | 2 | Ujung |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | Badan Kebijakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, dan | 3 | Ujung |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah, dan | 4 | Badan Pengkaji/ Pengkaji Rencana Daerah, dan | 4 | Sekretariat Balai Yeh | 4 | Intan |
| 5 | Dinas Sosial | 5 | Badan Keuangan Berbasis dan | | | 5 | Kuta Di Gie |
| 6 | Dinas Perencanaan, Perhubungan, dan | 6 | Rumahnya Aceh, dan | | | 6 | Saunah |
| 7 | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | 7 | Kota Jernih |
| 8 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | | | | | 8 | Lembah Seunah |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan | | | | | 9 | Meed Raja |
| 10 | Dinas Perhubungan | | | | | 10 | Deulasee |
| 11 | Dinas Pangan | | | | | 11 | Deulasee |
| 12 | Dinas Komunikasi dan | | | | | 12 | Kuta Baro |
| 13 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan | | | | | 13 | Ukayeh |
| 14 | Dinas Tenaga Kerja dan | | | | | | |
| 15 | Dinas Perencanaan, dan | | | | | | |
| 16 | Dinas Perhubungan dan | | | | | | |
| 17 | Dinas Perencanaan, dan | | | | | | |
| 18 | Dinas Perencanaan, dan | | | | | | |
| 19 | Dinas Kesehatan dan | | | | | | |
| 20 | Dinas Sosial | | | | | | |
| 21 | Dinas Pendidikan dan | | | | | | |
| 22 | Dinas Pendidikan | | | | | | |

Sumber. Profil Pembangunan Aceh Besar 2023

Berdasarkan Qanun yang sama Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 11 (sebelas) dinas yaitu :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Dinas Lingkungan Hidup;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Pangan;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdapat juga Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan pilihan, terdiri dari 3 (tiga) dinas yaitu :

1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Pertanian; dan
3. Dinas Kelautan dan Perikanan

Perangkat Daerah yang menangani urusan keistimewaan dan kekhususan, terdiri dari :

1. Dinas Syariat Islam;
2. Dinas Pendidikan Dayah;
3. Dinas Pertanahan;
4. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
5. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
6. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah; dan
7. Sekretariat Baitul Mal.

Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selain yang sudah tersebut di atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2018 masih menjelaskan Perangkat Daerah lain, terdiri dari :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
2. Rumah Sakit Umum Daerah; dan

Pemerintah Kecamatan

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar berjumlah 23 Kecamatan yang merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/Desember 2022

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/Desember 2022 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 32 orang , Administrator 164 orang, Pengawas 392 orang, Jabatan Fungsional guru 1718 orang, Jabatan Fungsional Medis 1164 orang, Jabatan Fungsional Teknis 190 orang, Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana 2345 orang.

JUMLAH PNS
TAHUN 2022
6.005

Disamping PNS untuk mendukung pencapaian Kinerja Pemerintah juga tidak terlepas dari Tenaga honorer/Kontrak yang terdiri dari tenaga administrasi perkantoran, tenaga paramedis, sopir, Satpol PP,

Wilayahul Hisbah dan Tenaga Kebersihan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 2351 orang.



Jumlah PNS Menurut Golongan



Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan



Isu Strategis

Isu-isu Strategis Pembangunan Kabupaten Aceh Besar mengacu pada Isu Strategis nasional dan Isu Strategis Aceh. Kondisi Kabupaten Aceh Besar yang memerlukan penanganan yang sangat urgensi. Isu strategis merupakan perbedaan (gap) antara kondisi saat ini (existing) dengan harapan yang tergambar tujuan pembangunan dalam masa transisi selama 4 tahun, menyelesaikan permasalahan yang belum selesai pada program sebelumnya dan melaksanakan optimalisasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan

ISU STRATEGIS NASIONAL

- Peningkatan produktivitas dan skala ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung kedaulatan pangan (melalui food estate dan korporasi petani dan nelayan);
- Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per kapita melalui pengembangan major

project pengembangan industri dan UMKM terpadu;

- Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan (jalan tol dan pembangkit listrik);
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera; dan
- Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

ISU STRATEGIS ACEH

- Peningkatan Kualitas Demokrasi
- Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam
- Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Lanjutan...

- Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan
- Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
- Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
- Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
- Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan
- Optimalisasi Kemandirian Pangan
- Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran
- Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis
- Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana.
- Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan

Isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut.

- **Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024** difokuskan kepada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan dan bebas money politic dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah

memastikan keterwakilan perempuan dalam pesta demokrasi tersebut.

- tidak kalah pentingnya adalah memastikan keterwakilan perempuan dalam pesta demokrasi tersebut.
- **Penanganan Covid 19** difokuskan padapenciptaan imunitas masyarakat melalui perluasan cakupan vaksinasi, dan aksi pencegahan lainnya seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, menunda atau membatasi perjalanan dan juga mengiringi dengan doa.
- **Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kualitas Pendidikan** difokuskan kepada berupa peningkatan kelembagaan, sumberdaya manusia, penambahan pra sarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik berfokus ke kompetensi keahlian dan pemerataan keahlian di setiap sekolah.
- **Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar** difokuskan dengan mengoptimalkan peningkatan skala ekonomi dan penumbuhan pusat-pusat ekonomi baru yang berbasis kawasan dengan pendekatan terintegrasi hulu hilir, merubah orientasi pasar produknya dari pasar lokal ke

Lanjutan...

pasar regional Provinsi dan tingkat nasional dan fokus pengembangan dilakukan terhadap peningkatan produktifitas dan nilai tambah komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan dan meningkatkan diversifikasi pangan. Optimalisasi koperasi, usaha/kelompok usaha kecil dan menengah perlu dilakukan dengan dukungan pendampingan dana yang cukup dari berbagai sumber yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

- **Kinerja Tata Kelola Pemerintah** difokuskan dengan Membangun Profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah, Meningkatkan Pelayanan publik atau pelayanan umum yang bersifat responsif/aktif: Penguatan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan praktik good and clean governance dan Penguatan azas akuntabilitas berupa pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- **Peningkatan kualitas dan Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan dan Penanganan Stunting** difokuskan dengan

Penerapan Germas dan konsumsi pangan dengan gizi seimbang mulai dari remaja pra nikah, ibu hamil, sampai bayi dan balita menjadi kunci keberhasilan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Besar.

- Penguatan nilai-nilai Syariat Islam, Kebudayaan, Keistimewaan Aceh difokuskan dengan peningkatan kemampuan membaca Al-Quran di kalangan anak-anak, orang dewasa dan lanjut usia. Mengadakan kegiatan berupa kelompok pengajian membaca Al Quran dengan memberdayakan tempat-tempat ibadah. Melaksanakan optimalisasi peran ulama dalam pembangunan dan peningkatan SDM tentang syariat Islam yang juga merupakan faktor yang mempengaruhi peningkatan minat belajar al quran dan ilmu agama di kalangan masyarakat, perlu peningkatan pelatihan dan pemberian beasiswa untuk mencetak ulama di lembaga pendidikan yang berprestasi baik, peningkatan kegiatan event islami yang masih kurang pembinaannya, dibentuk adanya gampong percontohan syariat Islam, memperkuat kelembagaan yang telah ada untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan, dan pendataan dan penertiban asset wakaf.

Lanjutan...

- **Penanggulangan Pencemaran Lingkungan hidup dan Kebencanaan** difokuskan dengan perencanaan dan pembangunan RTH, sosialisasi dan regulasi hal kebersihan lingkungan dan termasuk Regulasi persampahan di seluruh wilayah kabupaten.
- **Penurunan angka Kemiskinan** difokuskan dengan Peningkatan sarana prasarana pertanian, perikanan termasuk pasar rakyat dan pasar induk perlu dioptimalkan serta dikembangkan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.
- **Pengangguran dan Ketenagakerjaan** difokuskan dengan peningkatan kompetensi keahlian lulusan melalui magang industri dan pelatihan/training pada lembaga asosiasi profesi yang sesuai dengan pasar kerja lapangan kerja/ usaha baru, peningkatan serta mengoptimalkan Balai latihan kerja (BLK), mengundang investor untuk berinvestasi, dan melaksanakan kerja sama investasi baik dengan investor lokal maupun investor asing. Mengaktifkan dan mengoptimalkan sentra sentra industri yang telah ada dan

mempromosikan kawasan industri khusus

- **Peningkatan Infrastruktur dan konektivitas antar daerah penunjang Ekonomi** difokuskan dengan pembangunan jalan kabupaten, jalan kecamatan dan jalan desa, pengairan, air minum dan drainase.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

2

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI

Hasil evaluasi RPJM kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 memberikan informasi beberapa indikator tujuan dan sasaran yang sudah tercapai dilaksanakannya dan juga masih terdapat perencanaan yang harus dilanjutkan pelaksanaannya RPD Kabupaten Aceh Besar untuk periode 2023-2026. Merujuk pada Visi Pembangunan RPJP Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 - 2025 yaitu :



**VISI PEMBANGUNAN RPJP
:"TERWUJUDNYA
MASYARAKAT ACEH BESAR
YANG MAKMUR DAN
SEJAHTERA"**

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar, adalah:



**VISI PEMBANGUNAN RPJMD
"TERWUJUDNYA ACEH
BESAR YANG MAJU,
SEJAHTERA DAN
BERMARTABAR DALAM
SYARIAT ISLAM"**

MISI

Visi diatas diwujudkan melalui implementasi melanjutkan misi-misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Syariat Islam.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government), Bersih (Clean Government) dan Bertanggung Jawab (Responsible Government).
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur.
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Mukim dan Gampong.
6. Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal.

Perjanjian Kinerja

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada maka dalam RPD Kabupaten Aceh Besar 2023-2026 ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai berikut Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2023:

01 | PENINGKATAN PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN ACEH

- Meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran dan Al-Hadist serta Ijma' dan Qiyas

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--|--------|--------|
| Jumlah Masjid yang melaksanakan fungsi imarah, ri'ayah sesuai klasifikasinya | Unit | 160 |

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan dayah

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|--------|--------|
| Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah | % | 40 |

- Menguatnya tatanan ekonomi syari'ah

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|------------|--------|
| PersentasePenerimaan ZIS yang dikumpulkan | Rp. Milyar | 14,19 |

- Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang islami

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|--------|--------|
| Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi | Object | 8 |

01 | PENINGKATAN KUALITAS SDM BERDAYA SAING

- Meningkatkan kualitas pendidikan

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|------------------------------|--------|--------|
| Angka Rata-rata lama sekolah | Tahun | 10,50 |

- Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|-------------------------------------|--------|--------|
| Persentase guru yang bersertifikasi | % | 48,63 |

- Meningkatkan prestasi olah raga dan kepemudaan

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--|--------|--------|
| Persentase atlet yang mengikuti event olahraga | % | 42,36 |
| Persentase Organisasi kepemudaan yang aktif | % | 51,72 |

- Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|------------------------------------|--------|--------|
| Angka usia harapan hidup | tahun | 71,01 |
| Angka stunting | % | 27,90 |
| Persentase kematian kasus covid-19 | % | 4 |

- Meningkatkan pengarusutamaan gender

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--------------------------------|--------|--------|
| Index Pembangunan Gender (IPG) | Indeks | 94,95 |

Lanjutan...

- Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---------------------------------|--------|--------|
| Index Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 47,61 |

- Meningkatkan keluarga sejahtera

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Index Pembangunan Keluarga (Ibangga) | Indeks | 58,18 |
| Total Fertily Rate | % | 2,08 |

- Meningkatkan kualitas hidup anak

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|----------------------|--------|--------|
| Kabupaten Layak Anak | Strata | Madya |

03 | MENINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PELAYANAN DASAR

- Meningkatkan kesejahteraan PPKS

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|------------------------------------|--------|--------|
| Jumlah PPKS yang memperoleh Bansos | % | 17,62 |

- Meningkatkan ketahanan pangan

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|-------------------------------|--------|--------|
| Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | Indeks | 84,49 |

- Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|-----------------------|--------|--------|
| Indeks Desa Membangun | Indeks | 0,70 |

Lanjutan...

- Menurunnya angka pengangguran

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|--------|--------|
| Persentase tingkat pengangguran terbuka | % | 7,07 |

- Meningkatnya kesempatan kerja

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|--------|--------|
| Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja | % | 61,63 |

- Meningkatnya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--|--------|--------|
| Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU | % | 65 |
| Persentase Rumah Tangga dengan air minum layak | % | 88,59 |
| Persentase Rumah Tangga akses sanitasi layak | % | 88,31 |
| Persentase pengurangan area kawasan kumuh terhadap luas kawasan pemukiman penduduk perkotaan | % | 0.03 |

04 | MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH

- Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan bertanggung jawab

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|----------|--------|
| Perolehan Opini/Predikat terhadap Audit Laporan Keuangan oleh BPK | Predikat | WTP |
| Nilai Hasil Evaluasi (LkjIP) | Skor | 61,88 |
| Nilai LPPD | Nilai | 2,705 |

Lanjutan...

| | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| Nilai Kapasitas APIP | Level | II |
| Tingkat Maturitas SPIP | Level | III |
| Persentase Qanun yang ditetapkan | % | 46,67 |

- Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--|--------|--------|
| Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | % | 91,50 |
| Persentase penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD | 0 | 100 |

- Meningkatnya kualitas pengembangan daerah

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--|--------|--------|
| Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | % | 10 |

- Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|----------------------------|--------|--------|
| Indeks Profesionalitas ASN | indeks | 71,3 |

- Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--|--------|--------|
| Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan | % | 79,84 |
| Jumlah perizinan | Unit | 3608 |

Lanjutan...

| | | |
|--|------|------|
| Persentase pengunjung perpustakaan pertahun | % | 2,55 |
| Cakupan pelayanan umum pemerintah di tingkat kecamatan | Desa | 604 |

- Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|--------|--------|
| Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Indeks | 6 |

05 | MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN TATA KELOLA LINGKUNGAN

- Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--|--------|--------|
| Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik | % | 63,28 |

- Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|--------|--------|
| Persentase timbulnya sampah yang tertangani | % | 86,68 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 75,70 |
| Ketaatan terhadap RTRW | % | 87 |
| Pertumbuhan sub sektor Jasa Konstruksi | % | 34,10 |

- Optimalisasi Reformasi Agraria

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--|--------|--------|
| Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan | % | 77,35 |

Lanjutan...

06 | MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

- Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|--------|--------|
| Pertumbuhan sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | % | 4,04 |

- Mengembangkan sektor ekonomi mikro

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--|--------|--------|
| Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah | % | 5,92 |

- Meningkatkan kontribusi pariwisata

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|---|--------|--------|
| Pertumbuhan sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum | % | 3,51 |

- Menciptakan iklim investasi

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--|----------|--------|
| Jumlah nilai investasi | Triliyun | 1,7 |
| Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor | % | 4 |

07 | OPTIMALISASI KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM

- Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--|--------|--------|
| Jumlah Organisasi Masyarakat, LSM, OKP dalam memberantas narkoba dan penyakit sosial di masyarakat | Ormas | 246 |

Lanjutan...

- Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--|--------|--------|
| Persentase Parpol yang mendapatkan kursi | % | 55 |

- Meningkatnya penegakan ketertiban dan ketentraman umum

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|--|--------|--------|
| Persentase penanganan kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (TRIBUMTRAMAS) | % | 90 |

- Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana

| INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET |
|-------------------------|--------|--------|
| Indeks ketahanan daerah | Indeks | 0,41 |

Program Kegiatan Tahun 2023

Program dan anggaran perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mendukung capaian sasaran pada tahun 2023 sebagai berikut:

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp.) |
|----|---|-----------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 277.056.754.156 |
| 2 | Program Pengelolaan Pendidikan | 82.450.555.536 |
| 3 | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1.581.900.000 |
| 4 | Program Pendidikan Dayah | 7.459.351.000 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | 429.039.810 |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 144.965.516.292 |
| 7 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 92.541.905.150 |
| 8 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 2.382.973.783 |
| 9 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 471.962.000 |
| 10 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 2.331.932.508 |

Lanjutan...

| | | |
|----|--|----------------|
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 17.737.330.339 |
| 12 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 9.356.172.649 |
| 13 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 11.738.122.957 |
| 14 | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | 1.172.560.000 |
| 15 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 6.321.790.000 |
| 16 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | 2.260.609.000 |
| 17 | Program Penataan Bangunan Gedung | 850.024.000 |
| 18 | Program Penyelenggaraan Jalan | 43.440.001.100 |
| 19 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 1.655.800.000 |
| 20 | Program Pengembangan Perumahan | 465.008.200 |
| 21 | Program Kawasan Permukiman | 1.216.839.129 |
| 22 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 2.123.006.000 |
| 23 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 7.282.472.602 |
| 24 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 13.210.942.263 |

Lanjutan...

| | | |
|----|---|---------------|
| 25 | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1.767.048.916 |
| 26 | Program Penanggulangan Bencana | 199.938.702 |
| 27 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 3.066.760.000 |
| 28 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.890.568.656 |
| 29 | Program Pemberdayaan Sosial | 598.102.550 |
| 30 | Program Rehabilitasi Sosial | 2.014.487.180 |
| 31 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 3.099.827.000 |
| 32 | Program Penanganan Bencana | 1.680.035.150 |
| 33 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 117.080.000 |
| 34 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.359.644.336 |
| 35 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 3.700.000.000 |
| 36 | Program Penempatan Tenaga Kerja | 18.837.000 |
| 37 | Program Hubungan Industrial | 136.343.000 |
| 38 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.915.684.222 |

Lanjutan...

| | | |
|----|--|---------------|
| 39 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 497.077.637 |
| 40 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | 93.374.500 |
| 41 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 124.327.500 |
| 42 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.913.371.636 |
| 43 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 1.447.271.119 |
| 44 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 950.081.239 |
| 45 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 78.106.789 |
| 46 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.410.087.560 |
| 47 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 120.015.911 |
| 48 | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | 85.021.765 |
| 49 | Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | 149.974.086 |
| 50 | Program Penetapan Tanah Ulayat | 127.338.593 |
| 51 | Program Pengelolaan Tanah Kosong | 59.985.222 |
| 52 | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah | 49.964.100 |
| 53 | Program Penatagunaan Tanah | 59.917.242 |

Lanjutan...

| | | |
|----|---|---------------|
| 54 | Program Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pertanahan | 99.952.871 |
| 55 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7.321.949.493 |
| 56 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 200.000.000 |
| 57 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 59.462.000 |
| 58 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | 149.316.000 |
| 59 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 21.949.125 |
| 60 | Program Pengelolaan Persampahan | 4.331.136.360 |
| 61 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.761.217.792 |
| 62 | Program Pendaftaran Penduduk | 359.016.250 |
| 63 | Program Pencatatan Sipil | 35.965.000 |
| 64 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 45.964.109 |
| 65 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 33.169.761 |
| 66 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.175.890.618 |
| 67 | Program Penataan Desa | 10.000.000 |

Lanjutan...

| | | |
|----|---|----------------|
| 68 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 977.931.354 |
| 69 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 1.530.600.865 |
| 70 | Program Pengendalian Penduduk | 1.299.024.945 |
| 71 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | 10.254.783.210 |
| 72 | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 18.672.140 |
| 73 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.585.445.810 |
| 74 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 2.881.882.890 |
| 75 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.459.690.687 |
| 76 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 8.499.300.000 |
| 77 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 252.916.000 |
| 78 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.039.395.913 |
| 79 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | 428.260.000 |
| 80 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | 1.704.546.730 |
| 81 | Program Pengembangan UMKM | 1.042.963.000 |

Lanjutan...

| | | |
|----|---|---------------|
| 82 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.195.504.502 |
| 83 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 180.122.975 |
| 84 | Program Promosi Penanaman Modal | 57.751.750 |
| 85 | Program Pelayanan Penanaman Modal | 2.500.585.283 |
| 86 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 479.999.892 |
| 87 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 101.905.700 |
| 88 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.117.538.676 |
| 89 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 881.543.985 |
| 90 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 3.370.791.432 |
| 91 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 299.983.000 |
| 92 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 31.490.000 |
| 93 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 111.500.000 |
| 94 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.417.125.395 |
| 95 | Program Pengembangan Kebudayaan | 1.340.266.56 |

Lanjutan...

| | | |
|-----|---|----------------|
| 96 | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | 119.890.000 |
| 97 | Program Pengelolaan Permuseuman | 46.200.000 |
| 98 | Program Majelis Adat Aceh (MAA) | 441.795.410 |
| 99 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.898.475.873 |
| 100 | Program Pembinaan Perpustakaan | 965.950.263 |
| 101 | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | 195.860.000 |
| 102 | Program Pengelolaan Arsip | 267.592.398 |
| 103 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.316.335.656 |
| 104 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 913.835.200 |
| 105 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 813.631.180 |
| 106 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 453.296.250 |
| 107 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 367.314.400 |
| 108 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 529.957.340 |
| 109 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 27.162.455.998 |

Lanjutan...

| | | |
|-----|---|----------------|
| 110 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 7.126.161.048 |
| 111 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 4.908.261.720 |
| 112 | Program Penyuluhan Pertanian | 2.602.666.449 |
| 113 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | 0 |
| 114 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 3.491.447.135 |
| 115 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 534.763.091 |
| 116 | Program Pengembangan Ekspor | 472.831.995 |
| 117 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | 63.571.665 |
| 118 | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | 34.782.500 |
| 119 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 1.220.061.000 |
| 120 | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi | 58.640.000 |
| 121 | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | 384.534.600 |
| 122 | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 109.375.000 |
| 123 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 28.972.945.726 |

Lanjutan...

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 124 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 1.829.853.402 |
| 125 | Program Perekonomian dan Pembangunan | 2.545.636.229 |
| 126 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 27.189.672.898 |
| 127 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 16.625.575.600 |
| 128 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7.513.180.188 |
| 129 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1.012.978.275 |
| 130 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 718.768.000 |
| 131 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 66.641.378.627 |
| 132 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 568.772.101.410 |
| 133 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1.261.028.901 |
| 134 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 2.002.790.846 |
| 135 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.564.961.003 |
| 136 | Program Kepegawaian Daerah | 1.759.577.612 |
| 137 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.969.142.534 |

Lanjutan...

| | | |
|-----|--|----------------|
| 138 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 639.511.420 |
| 139 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 8.497.980.548 |
| 140 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 2.861.383.000 |
| 141 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 242.106.000 |
| 142 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 46.724.114.717 |
| 143 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 2.993.784.506 |
| 144 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1.953.666.904 |
| 145 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1.041.875.650 |
| 146 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.022.847.232 |
| 147 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | 1.217.834.502 |
| 148 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 2.103.179.944 |
| 149 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 60.267.941 |
| 150 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 176.611.220 |

Lanjutan...

| | | |
|-------|--|--------------------------|
| 151 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 570.877.000 |
| 152 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7.822.855.727 |
| 153 | Program Syariat Islam Aceh | 9.129.908.740 |
| 154 | Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh | 154.408.500 |
| 155 | Program Baitul Mal | 14.806.611.610 |
| TOTAL | | 1.478.741.700.590 |



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Capaian Kinerja

Perbandingan antara Target dan Tealisasi Kinerja Tahun 2023 dan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Analisis Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \text{Realisasi/Rencana} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \text{Realisasi} - (\text{Realisasi-Rencana/Rencana} \times 100\%)$$

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian Kinerja pada tingkat sasaran digunakan skala pengukuran dengan Rentang Capaian dan kategori capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 ISkala Nilai Peringkat Kerja berdasarkan Interval nilai Realisasi Kerja dan kriteria penilaian Realisasi Kerja $90,01\% \leq 100\%$ Sangat Tinggi $75,01\% \leq 90\%$ Tinggi $65,01\% \leq 75\%$ Sedang $50,01\% \leq 65\%$ Rendah dan $\leq 50\%$ Sangat Rendah

Di tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan 7 tujuan 35 sasaran kinerja dan dan 54 indikator kinerja dan pada akhir tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah melaksanakan seluruh tujuan dan sasaran, indikator kinerja yang telah menjadi tanggung jawabnya walaupun tidak semua target dapat terealisasi dengan sempurna. Adapun seluruh pencapaian tujuan, sasaran diuraikan dalam realisasi indikator kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Lanjutan...

REALISASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023 DENGAN TARGET RPD 2026

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI KINERJA 2023 | CAPAIAN KINERJA 2023 | TARGET AKHIR RPD 2026 | CAPAIAN 2023 S/D AKHIR TAHUN RPD 2026 | INSTANSI |
|-----|--|---|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| 1. | Meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran dan Al-Hadist serta Ijma' dan Qiyas | Jumlah masjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan ri'ayah sesuai klasifikasinya | 160 | 145 | 90,63 | 205 | 70,73 | DINAS SYARIAT ISLAM; MPU |
| 2. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan dayah | Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah | 41,44 | 55,07 | 132,89 | 50 | 110,14 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH |
| 3. | Menguatnya tatanan ekonomi syariah | Penerimaan ZIS yang dikumpulkan | 14,19 | 12,45 | 87,74 | 16,53 | 75,32 | BAITUL MAL |
| 4. | Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | 8 | | 0,00 | 8 | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; MAA |
| 5. | Meningkatnya kualitas pendidikan | Angka rata-rata lama sekolah | 10,50 | 10,36 | 98,67 | 11,04 | 93,84 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 6. | Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan | Persentase guru yang bersertifikasi | 48,63 | 27,01 | 55,54 | 78,63 | 34,35 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; MPD |
| 7. | Meningkatnya prestasi olahraga dan kepemudaan | Persentase Atlet yang mengikuti even Olahraga | 42,36 | 29,23 | 69,00 | 42,36 | 69,00 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARHAGA |
| | | Persentase organisasi kepemudaan yang aktif | 51,72 | 47,89 | 92,59 | 65,16 | 73,50 | DINAS PARIWISATA |
| 8. | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Angka Usia Harapan Hidup | 71,01 | 73,11 | 102,96 | 71,55 | 102,18 | DINAS KESEHATAN |
| | | Angka Stunting | 27,9 | 27,00 | 96,77 | 14,00 | 192,86 | DINAS KESEHATAN |
| 9. | Meningkatkan pengarusutamaan gender | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 94,95 | 95,22 | 100,28 | 95,09 | 100,14 | DPP,KB,PP&PA |
| 10. | Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 47,61 | 47,65 | 100,08 | 48,33 | 98,59 | DPP,KB,PP&PA |
| 11. | Meningkatnya Keluarga Sejahtera | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibanga) | 58,18 | 57,79 | 99,33 | 58,24 | 99,23 | DPP,KB,PP&PA |
| | | Total Fertility Rate | 2,08 | 2,37 | 113,94 | 2,02 | 117,33 | DPP,KB,PP&PA |
| 12. | Meningkatnya kualitas hidup Anak | Kabupaten Layak Anak | Madya | Madya | 100,00 | Nindya | 66,66 | DPP,KB,PP&PA |
| 13. | Meningkatnya kesejahteraan PPKS | Jumlah PPKS yang memperoleh Bansos | 17,62 | | 0,00 | 19,70 | 0,00 | DINAS SOSIAL |
| 14. | Meningkatkan ketahanan pangan | Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | 84,49 | 81,49 | 96,45 | 85,80 | 94,98 | DINAS PANGAN |
| 15. | Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa | Indeks Desa Membangun | 0,70 | 0,68 | 97,14 | 0,76 | 89,47 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & GAMPONG |

Lanjutan...



| | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------|-----------|--------|-------|--------|--|
| 16. | Menurunnya angka pengangguran | Persentase tingkat pengangguran terbuka | 7,07 | 8,17 | 15,56 | 5,42 | 150,74 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 17. | Meningkatnya kesempatan kerja | Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja | 61,63 | 65,31 | 105,97 | 64,63 | 101,05 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 18. | Meningkatnya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat | Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU | 65,00 | 65,00 | 100,00 | 74,00 | 87,84 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | Persentase Rumah Tangga dengan air minum layak | 90,09 | 92,64 | 102,83 | 88,59 | 104,57 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak | 86,31 | 87,39 | 101,25 | 87,79 | 99,54 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | Persentase pengurangan area Kawasan Kumuh terhadap luas Kawasan permukiman penduduk perkotaan | 0,034 | 0,034 | 100,00 | 0,034 | 100,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 19. | Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan bertanggung jawab | Perolehan Opini/Predikat terhadap Audit Laporan Keuangan oleh BPK | WTP | WTP | 100,00 | WTP | 100,00 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | | Nilai Hasil Evaluasi (LKJIP) | 61,88 | 52,69 | 85,15 | 64,55 | 81,63 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | Nilai LPPD | 2,705 | 2,6074 | 96,39 | 2,72 | 95,86 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | Nilai Kapabilitas APIP | II | Level II | 100,00 | III | 66,66 | INSPEKTORAT |
| | | Tingkat Maturitas SPIP | III | Level III | 100,00 | III | 100,00 | INSPEKTORAT |
| | | Persentase Qanun yang ditetapkan | 46,67 | 22,22 | 47,61 | 47,62 | 46,66 | SEKRETARIAT DPRK |
| 20. | Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah | Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | 91,50 | 100 | 109,29 | 95,00 | 105,26 | BAPPEDA |
| | | Persentase penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 100,00 | BAPPEDA |
| 21. | Meningkatnya kualitas pengembangan daerah | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | 10 | 11,43 | 114,30 | 21 | 54,43 | BAPPEDA |
| 22. | Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur | Indeks Profesionalitas ASN | 56,00 | 32,17 | 57,45 | 56,00 | 57,45 | BKPSDM |
| 23. | Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. | Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan | 79,84 | 80,53 | 100,86 | 82,26 | 97,90 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL |
| | | Jumlah perizinan | 3608 | | 0,00 | 3758 | 0,00 | DPM-PTSP |
| | | Persentase pengunjung perpustakaan per tahun | 2,55 | | 0,00 | 3,25 | 0,00 | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN |
| | | Cakupan pelayanan umum pemerintahan di tingkat kecamatan | 604 | 603 | 99,83 | 604 | 99,83 | 23 KECAMATAN |
| 24. | Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik | Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | 1,79 | 1,88 | 105,03 | 87 | 2,16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

Lanjutan...

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------|-------|--------|---------------|--------------|--|
| 25. | Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah | Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik | 41,60 | 35,00 | 84,13 | 66,88 | 52,33 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG; DINAS PERHUBUNGAN |
| 26. | Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan | Persentase timbulan sampah yang tertangani | 33,09 | 55,00 | 166,21 | 86,68 | 63,45 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 75,70 | 71,59 | 94,57 | 76,5 | 93,58 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | Ketaatan terhadap RTRW | 87,00 | 91,00 | 104,60 | 87,05 | 104,54 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Konstruksi | 34,10 | -1,77 | -5,19 | 37,44 | -4,73 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 27. | Optimalisasi Reformasi Agraria | Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan | 77,35 | 100 | 129,28 | 77,75 | 128,62 | DINAS PERTANAHAN; SEKRETARIAT DAERAH |
| 28. | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan | Pertumbuhan sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | 4,04 | 1,97 | 48,76 | 6,09 | 32,35 | DINAS PERTANIAN; DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 29. | Mengembangkan sektor ekonomi mikro | Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah | 5,92 | 2,72 | 45,95 | 6,12 | 44,44 | DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN |
| 30. | Meningkatkan kontribusi pariwisata | Pertumbuhan sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum | 3,51 | 32,12 | 915,10 | 5,23 | 614,15 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 31. | Menciptakan iklim investasi | Jumlah Nilai Investasi | 1,70 | 1,46 | 85,88 | 1,85 | 78,92 | DPM-PTSP |
| | | Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor | 4,00 | 4,36 | 109,00 | 4,90 | 88,98 | DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN |
| 32. | Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) | Jumlah Organisasi Masyarakat, LSM, OKP dalam memberantas narkoba dan penyakit sosial di masyarakat | 246 | 246 | 100,00 | 245 | 100,41 | KESBANGPOL & LINMAS |
| 33. | Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum | Persentase parpol yang mendapatkan kursi | 55,00 | 45,00 | 81,82 | 60,00 | 75,00 | KESBANGPOL & LINMAS |
| 34. | Meningkatnya penegakan ketertiban dan ketentraman umum | Persentase penanganan kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (TRIBUMTRAMAS) | 90,00 | 98,68 | 109,64 | 95,00 | 103,87 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH |
| 35. | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | Indeks ketahanan daerah | 0,41 | 0,33 | 80,49 | 0,41 | 80,49 | BPBD |
| | | | | | | 100,48 | 88,82 | |

1. Peningkatan Pelaksanaan Keistimewaan Aceh

Untuk menunjang Peningkatan Pelaksanaan Keistimewaan Aceh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dihitung berdasarkan persentase menurunnya pelanggaran syariat islam Untuk mendukung Peningkatan Pelaksanaan Keistimewaan Aceh Pemerintah Kabupaten Aceh Menetapkan 4 (Empat) Sasaran Dan 4 (Empat) Indikator Sasaran.

SASARAN 1.1 MENINGKATNYA KUALITAS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP AL-QURAN DAN AL-HADIST SERTA IJMA' DAN QIYAS

Pada sasaran ini dapat dilihat dengan indikator Jumlah masjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan ri'ayah sesuai klasifikasinya hanya terlaksana 145 unit dari target 160 unit dengan capaian kinerja 90,66 dengan kategori Sangat Tinggi , namun baru mampu mencapai 70,73 dari target RPD Dalam hal ini, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar Dan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Besar menjadi leading sector ketugasan meliputi aspek utama, manajemen dan pendukung dalam Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran dan Al-Hadist serta Ijma' dan Qiyas. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar melalui Program Syariat Islam Aceh dengan kegiatan Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran, Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam, Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat, Pembinaan Qari Qariah dan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Besar Melalui Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan capaian indikatornya 72,12 % dan kegiatannya: Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama melalui kegiatan yang dilaksanakan seperti Sidang Majelis, Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama Permusyawaratan Ulama, Pendidikan Kader Ulama , Muzakarah Masalah Keagamaan, dan Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALIS ASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|----------|------------|-----------------|
| Jumlah masjid yang melaksanakan fungsi idarah, imarah dan ri'ayah sesuai klasifikasinya | 160 Unit | 145 Unit | 90,63 |



Lanjutan...

SASARAN 1.2 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PENDIDIKAN DAYAH

Capaian Kinerja sasaran strategis ini dihitung dengan indikator Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah bisa dikategorikan Sangat Tinggi. dengan capaian kinerja 132,89% dimana terrealisasi 55,07% ini melebihi target RPD yang hanya menargetkan 50 % dayah yang memenuhi standarisasi dayah, hal ini tidak lepas dari kerja keras Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Dinas Pendidikan Dayah yang berupaya agar semua dayah yang ada di Kabupaten Aceh Besar memenuhi dan memiliki standarisasi dayah yang telah ditentukan, sehingga lulusan dari dayah bisa juga mampu bersaing di bidang pendidikan pasca lulus dari dayah. Melalui Program Pendidikan Dayah dengan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dayah melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah, Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah, Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah dan dukungan dana sebesar 5,420,000,000 sehingga terealisasinya target yang telah ditentukan.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|---------|-----------|-----------------|
| Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah | 41,44 % | 55,07 % | 132,89 % |

SASARAN 1.3. MENGUATNYA TATANAN EKONOMI SYARI'AH

Capaian Kinerja sasaran strategis ini dihitung dengan Indikator Penerimaan ZIS yang dikumpulkan, ini bisa dikategorikan Tinggi dengan realisasi mencapai 12,45 Milyar atau capaian kinerja 87,73% berdasarkan data dari sekretariat Baitul Mal, ZIS yang dikumpulkan diperoleh dari penerimaan zakat Rp 9,18 Milyar (64,73%) dan dari penerimaan Infaq Rp. 3,27 Milyar (23%) tapi belum mampu mencapai target RPD 16,53M untuk mengatasi permasalahan ini sekretariat Baitul Mal melalui Program Baitul Mal dan kegiatan Pengelolaan ZISWAF, Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal dengan kegiatannya : Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF, Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal,



Lanjutan...

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM, Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal kedepannya dan berharap semakin banyak badan usaha baik nasional maupun swasta yang beroperasi di Aceh Besar menyalurkan zakat, maka akan semakin banyak jumlah penerima manfaat yang dapat dibantu. Zakat dan infak yang berhasil terkumpulkan sepanjang tahun 2023 tersebut disalurkan kepada delapan kelompok penerima manfaat Adapun program unggulan Baitul Mal Aceh Besar terdiri atas penyantunan 1.076 keluarga fakir uzur, 2.100 keluarga miskin, sepuluh orang keluarga muallaf, enam orang keluarga gharimin, 210 santri dalam kabupaten dan luar kabupaten, dan empat orang ibnu sabil, disusul dengan melaksanakan delapan kegiatan syiar Islam, bantuan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kepada 204 orang, membangun satu unit aset ekonomi produktif, dan melaksanakan sosialisasi hukum Islam untuk guru dan murid.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Penerimaan ZIS yang dikumpulkan | 14,19 Milyar | 12,45 Milyar | 87,73 |

SASARAN 1.4 MENGUATNYA TATANAN BUDAYA, ADAT ISTIADAT DAN SENI KE-ACEHAN YANG ISLAMI

Pada sasaran ini dapat dilihat dengan indikator Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi namun Capaian Kinerja sasaran strategis ini bisa dikategorikan sangat rendah dengan capaian kinerja 0% . dikarenakan masih belum adanya pendataan yang akurat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekretariat Majelis Adat Aceh. Melalui Program Pengembangan Kebudayaan dan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatannya: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,



Lanjutan...

dan Pranata Tradisional, Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya dan kegiatannya: Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Program Pengelolaan Permuseuman dan kegiatannya: Pengelolaan Museum, Kabupaten/Kota

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|--------|-----------|-----------------|
| Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | 8 | - | 0,00 |

2. Peningkatan Kualitas SDM berdaya saing

Untuk meningkatkan Kualitas SDM berdaya saing dihitung berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 2022 IPM sebesar 74,00, terjadi peningkatan 1,98 poin menjadi angka 75,98 pada tahun 2023. Pencapaian IPM ini sudah melebihi dari yang ditargetkan dalam RPD tahun 2023-2026 yaitu 74,78. Bidang Pendidikan merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah sama halnya dengan bidang kesehatan Untuk menunjang Peningkatan Kualitas SDM berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan 8 (delapan) sasaran dan 12 (dua belas) Indikator Sasaran. Peningkatan Kualitas SDM berdaya saing merupakan kebijakan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meningkat secara signifikan.

SASARAN 2.1 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

Capaian Kinerja sasaran strategis ini dihitung dengan Indikator Angka rata-rata lama sekolah, dapat dikategorikan Sangat Tinggi. dengan capaian kinerja 98,67 walaupun realisasi belum bisa mencapai target kinerja 10,50 % dan target RPD 11,04 % Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar sebagai leading sektornya telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatnya kualitas pendidikan melalui Program Pengelolaan Pendidikan dan kegiatannya: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan



Lanjutan...

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Program Pengembangan Kurikulum dan kegiatannya: Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, dan Sekretariat Majelis Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Besar juga dengan Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh dan Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh dengan kegiatannya: Penetapan Standar Pendidikan Aceh, Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh, Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh dengan kegiatannya: Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh, Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh, Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dimana program dan kegiatan tersebut mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Angka rata-rata lama sekolah | 10,50 Tahun | 10,36 Tahun | |

SASARAN 2.2 MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Sasaran strategis ini dihitung dengan Indikator Persentase guru yang bersertifikasi dengan capaian 27,01% dengan kategori rendah, masih jauh sekali dari target kinerja 48,63% ataupun RPD 78,63 % melalui Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dan kegiatannya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan kegiatannya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan , Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan



Lanjutan...

kedepannya Pemerintah Kabupaten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya bisa lebih fokus dan memperhatikan upaya untuk meningkatkan nilai persentase guru yang bersertifikasi sehingga target RPD tercapai dan jumlah Pendidik 6836 di Kabupaten Aceh Besar terpenuhi.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----------------|
| Persentase guru yang bersertifikasi | 48,63 % | 27,01 % | 55,54 % |

SASARAN 2.3 MENINGKATNYA PRESTASI OLAH RAGA DAN KEPEMUDAAN

Sasaran strategis ini dihitung dengan Indikator Persentase Atlet yang mengikuti even Olahraga dengan capaian 69,00% dengan kategori sedang, hanya mampu merealisasi 29,23 % dari target kinerja 42,36 % masih jauh sekali dari target RPD 48,60% untuk meningkatnya prestasi olah raga dan kepemudaan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Aceh Besar melalui Program Pengembangan Keolahragaan yang menargetkan 171 atlet yang berprestasi melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. namun program tersebut belum menunjukkan hasil maksimal dalam upaya untuk Meningkatkan Prestasi Olah Raga dan Kepemudaan di Kabupaten Aceh Besar.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|---------|-----------|-----------------|
| Persentase Atlet yang mengikuti even Olahraga | 42,36 % | 29,23 % | 69,00 % |

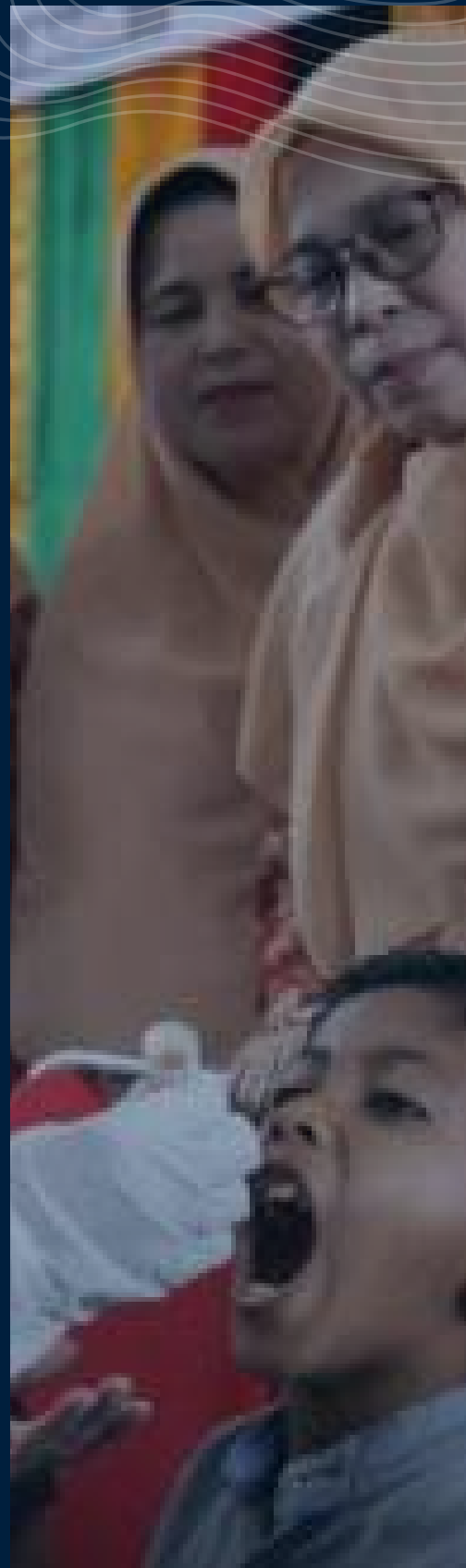


Lanjutan...

SASARAN 2.4 MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja 98,87 bisa dikategorikan Sangat Tinggi, dengan Usia Harapan Hidup 73,11 % dan Angka Stunting 27,00% untuk meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh besar yang menjadi leading sector melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat telah menyediakan 38 unit Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan permenkes 43 Tahun 2019 menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap 11449 Orang Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, 10924 Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar , 10350 Orang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, 35585 Orang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, 1176 Orang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar , 276456 Orang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi adapun program-pram pendukung lainnya yang dilaksanakan seperti Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sehingga Kabupaten Aceh Besar kaberdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 yang lalu, angka stunting di Kabupaten Aceh Besar berada pada angka 27,0%. Sedangkan pada tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Aceh Besar sebesar 32,4 %, dan mampu menurunkan angka stunting sebesar 5% dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Keputusan Bupati Nomor 209 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 304 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024 ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menurunkan Stunting.

27,01
%



Lanjutan...

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--------------------------|---------|-----------|-----------------|
| Angka Usia Harapan Hidup | 71,01 % | 73,11 % | 102,9 |
| Angka Stunting | 27,9 % | 27,00 % | 96,77 |
| | | | 99,87 |

SASARAN 2.5 MENINGKATKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Capaian Kinerja sasaran strategis ini bisa dikategorikan Sangat Tinggi. dengan capaian kinerja 100,28% dimana realisasi 95,22% melebihi target awal yang hanya menargetkan 94,95% target RPD 95, 05% untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) hal ini tidak lepas dari kerja keras Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan berupaya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam pengarusutamaan termasuk penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan perempuan dan anak. melalui Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota terhadap 42 OPD, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota terhadap 50 Organisasi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota terhadap 20 lembaga dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak dengan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sehingga mampu meningkatkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Aceh Besar.



Lanjutan...

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 94,95 Indeks | 95,22 Indeks | 100,28 |

SASARAN 2.6 MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

Capaian Kinerja sasaran strategis ini bisa dikategorikan Sangat Tinggi. dengan capaian kinerja 100,08% dimana realisasi 47,65% melebihi target awal yang hanya menargetkan 47,61% namun belum melebihi target RPD 48,33% . meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa peran perempuan sudah semakin baik di bidang ekonomi, politik, pengambilan keputusan serta pembangunan daerah dimana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melalui Program Perlindungan Perempuan dengan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota adanya 10 Kasus yang diselesaikan , Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan adanya 5 Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan adanya 7 lembaga penyedia layanan Perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 47,61 Indeks | 47,65 Indeks | 100,08 |



Lanjutan...

SASARAN 2.7 MENINGKATNYA KELUARGA SEJAHTERA

Capaian Kinerja sasaran strategis ini bisa dikategorikan Sangat Tinggi. diukur menggunakan 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja rata-rata mencapai 106,94% dimana target Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) 58,18 Indeks terealisasi 57,79 Indeks atau 99,33%, sedangkan target RPD menargetkan 58,24 (99,23%) dari realisasi tahun ini. dengan persentase tersebut menggambarkan keberhasilan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Aceh Besar dalam upaya untuk meningkatnya kualitas Keluarga Sejahtera semakin baik melalui Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota tersedia 2 layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah kabupaten / kota dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdapat 348 kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga, bkb,bkr,pik-r,bkl,uupks dan pemberdayaan ekonomi keluarga yang dibantu dan melibatkan 350 Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS). Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) dengan Kegiatannya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.



Lanjutan...

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) | 58,18 Indeks | 57,79 Indeks | 99,33 |
| Total Fertility Rate | 2,08 % | 2,37 % | 113,94 |

SASARAN 2.8 MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP ANAK

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Kabupaten Layak Anak dengan capaian kinerja rata-rata mencapai 100% bisa dikategorikan Sangat Tinggi dimana Kabupaten Aceh Besar sudah mencapai target kinerja namun bila dibandingkan dengan target RPD Nindya (66,66%) dari realisasi kinerja tahun ini. Untuk meningkatkan kualitas hidup Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melalui Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan kegiatannya: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang melibatkan 70 Organisasi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang melibatkan 10 Lembaga, dan Program Perlindungan Khusus Anak dengan kegiatannya: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotamenjadi kunci keberhasilan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatnya kualitas hidup Anak.



Lanjutan...

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Kabupaten Layak Anak | Madya strata | Madya strata | 100,00 |

3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Dasar

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Dasar dihitung berdasarkan Angka Kemiskinan Dimana terjadi penurunan Angka Kemiskinan 0,67 dari tahun 2021 (14,05 %) dan tahun 2022 (13,38%) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah membentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 301 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023. Hal ini menjadi komitmen serius Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk tercapainya penurunan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Dasar Kabupaten Aceh Besar menetapkan 8 (delapan) sasaran dan 12 (dua belas) Indikator Sasaran. Peningkatan Kualitas SDM berdaya saing merupakan kebijakan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meningkat secara signifikan. Hal ini dapat dilihat data berikut ini. Untuk menunjang Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Dasar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan 6 (enam) sasaran dan 9 (sembilan) Indikator Sasaran.



Lanjutan...

SASARAN 3.1 MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PPKS

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Jumlah PPKS yang memperoleh Bansos dan bisa dikategorikan sangat rendah. dengan capaian kinerja 0%. dikarenakan belum adanya data yang valid dari Dinas Sosial dan dari data dibawah dapat dilihat capaian kinerja indikator sasaran ini bisa dikatakan belum tercapai dikarenakan keterbatasannya anggaran dalam pemberian bantuan sosial untuk masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Dinas Sosial melalui program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, namun program tersebut belum berkontribusi langsung untuk meningkatkan Kesejahteraan PPKS

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|------------------------------------|---------|-----------|-----------------|
| Jumlah PPKS yang memperoleh Bansos | 17,62 % | % | 0,00 |

SASARAN 3.2 MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP), target kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 84,49 Indeks baru bisa terealisasi 81,49 Indeks dengan capaian kinerja rata-rata mencapai 96,45% bisa dikategorikan Sangat Tinggi, tapi untuk target RPD 85,80 Indeks (94,98 %) dari capaian kinerja tahun ini. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), dari 18 kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar memiliki ketahanan pangan tertinggi. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar sebagai dinas Leading Sectornya melalui Program Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, telah mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk meningkatnya ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.



Lanjutan...

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | 84,49 Indeks | 81,49 Indeks | 96,45 |

SASARAN 3.3 MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Capaian Kinerja sasaran strategis ini bisa dikategorikan Sangat Tinggi. dengan capaian kinerja 97,14,% walaupunrealisasi belum bisa mencapai target kinerja Indeks Desa Membangun 0,70 Indeks dan target RPD 0,78 Indeks namun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan gampong melalui Program Penataan Desa dengan kegiatannya: Penyelenggaraan Penataan Desa dengan melibatkan 30 gampong, Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatannya: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang melibatkan 604 Gampong, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatannya: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan 604 Gampong. Dimana program dan kegiatan tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan gampong dari maju menjadi mandiri. Gampong mandiri tumbuh menjadi 29 gampong pada tahun 2023 dari sebelumnya 15 gampong pada tahun 2022 pemanfaatan dana desa secara tepat sasaran, mengacu pada kepentingan masyarakat, secara langsung telah meningkatkan perekonomian, menjaga inflasi dan telah memberikan kemudahan akses melalui pembangunan infrastruktur pembangunan desa di Kabupaten Aceh Besar .



Lanjutan...

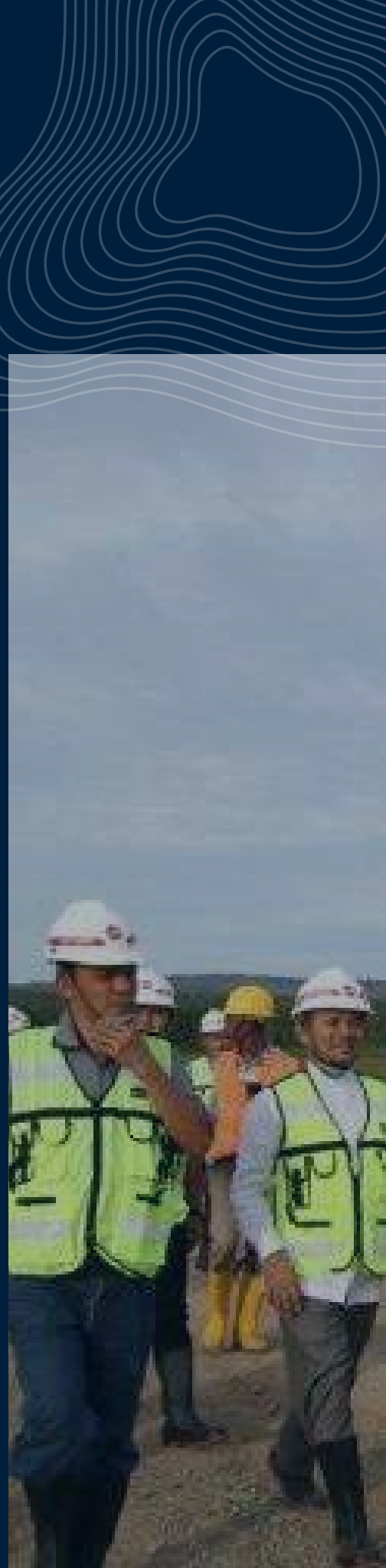
| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Indeks Desa Membangun | 0,70 Indeks | 0,68 Indeks | 97,14 |

SASARAN 3.4 MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN

Capaian Kinerja sasaran strategis ini bisa dikategorikan Sangat rendah. dengan capaian kinerja 15,56% dengan perhitungan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Walaupun belum mampu merealisasi target kinerja 7,07% dan taget RPD 5,42% Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Aceh Besar melalui Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatannya: Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Dengan Melibatkan 400 Orang , Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Dan Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Yang Mampu Ditangani Baru 5 Lembaga, namun program dan kegiatan tersebut belum berpengaruh untuk menurunkan angka pengangguran terbuka dimana Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2018–2022 Kabupaten Aceh besar menempati posisi no 8 dengan nilai 8,28% tahun 2022 naik 0,56 dimana pada tahun 2021 7,7% ,dikarenakan terbatasnya anggaran dimana Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 menurut buku Profil Pembangunan Aceh Besar tahun 2023 adalah sebanyak 407 orang, dimana jumlah pencari kerja laki-laki 190 orang lebih sedikit dari pada perempuan 217 orang. Jika dilihat dari jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut jenjang pendidikan, yang mendominasi adalah tingkat pendidikan SMA/ sederajat dengan jumlah 145 orang, kemudian tingkat pendidikan S1/D4 sebanyak 90 orang dan yang baru bias ditempatkan 29 orang saja dari total jumlah pencari kerja.



Lanjutan...

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|--------|-----------|-----------------|
| Persentase tingkat pengangguran terbuka | 7,07% | 8,17% | 15,56 |

SASARAN 3.5 MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA

Untuk Capaian Kinerja sasaran strategis ini Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bisa dikategorikan Sangat Tinggi sudah berhasil Meningkatkan kesempatan kerja dengan melihat Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dengan capaian kinerja mencapai 105,97%, dimana mampu merealisasi target 61,63% dan target RPD 64,63% melalui Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Aceh Besar tetap akan berupaya bisa lebih baik lagi dalam meningkatkannya kesempatan kerja mengingat masih tingginya angka pengangguran sehingga mampu menyediakan dan menciptakan Lapangan kerja yang baru di Kabupaten Aceh Besar kedepannya.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|---------|-----------|-----------------|
| Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja | 61,63 % | 65,31% | 105,97 |

SASARAN 3.6 MENINGKATNYA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT

Capaian Kinerja sasaran strategis ini bisa dikategorikan Sangat Tinggi. diukur menggunakan 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 101,02% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar telah berhasil karena mampu merealisasi target kinerja melalui Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatannya: Pendataan



Lanjutan...

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan kegiatannya: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatannya:

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan kegiatannya: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan kegiatannya: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan kegiatannya: Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dimana program dan kegiatan tersebut mampu meningkatkannya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|---------|-----------|-----------------|
| Persentase kawasan permukiman yang mendapat dukungan PSU | 65,00 % | 65,00% | 100,00 |
| Persentase Rumah Tangga dengan air minum layak | 90,09 % | 92,64% | 102,83 |
| Persentase Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak | 86,31 % | 87,39% | 101,25 |
| Persentase pengurangan area Kawasan Kumuh terhadap luas Kawasan permukiman penduduk perkotaan | 0,034 % | 0,034% | 100,00 |
| | | | 101,02 % |



Lanjutan...

4. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah

Untuk Meningkatkan akuntabilitas pemerintah diukur menggunakan indikator tingkat akuntabilitas kinerja dimana Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menargetkan predikat B dari hasil enaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memperoleh nilai predikat CC (59,69), hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan 6 sasaran dan 15 indikator sasaran guna untuk Meningkatkan akuntabilitas pemerintah

SASARAN 3.6 MENINGKATNYA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT

Capaian Kinerja sasaran strategis ini bisa dikategorikan Tinggi dengan rata-rata capaian kinerja 88,19% diukur menggunakan 6 indikator kinerja Perolehan Opini/Predikat terhadap Audit Laporan Keuangan oleh BPK, Nilai Kapabilitas APIP, Tingkat Maturitas SPIP telah mampu mencapai target kinerja namun belum bisa mencapai target nasional RPD dan target Nasional. namun Nilai LPPD, Nilai Hasil Evaluasi (LKjIP), Persentase Qanun yang ditetapkan belum mampu mencapai target kinerja dan target RPD dimana 18 Qanun yang ditargetkan hanya 4 yang dapat ditetapkan untuk Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang bersih dan bertanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh besar dan Seluruh OPD dalam lingkup Kabupaten Aceh Besar telah berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan pelatihan, dan akan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP dan hasil evaluasi pelaksanaan RB

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|--------|-----------|-----------------|
| Perolehan Opini/Predikat terhadap Audit Laporan Keuangan oleh BPK | WTP | WTP | 100,00 |



Lanjutan...

| | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-------|
| Nilai Hasil Evaluasi (LKjIP) | 61,88 Skor | 52,69 Skor | 85,15 |
| Nilai LPPD | 2,705 Nilai | 2,6074 Nilai | 96,39 |
| Nilai Kapabilitas APIP | Level 2 | Level 2 | 100 |
| Tingkat Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | 100 |
| Persentase Qanun yang ditetapkan | 46,67 % | 22,22 | 41,76 |

SASARAN 4.2 MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian Kinerja sasaran strategis ini bisa dikategorikan Sangat Tinggi, diukur menggunakan 2 indikator kinerja Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan Persentase penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD dengan rata-rata capaian kinerja 104,64% Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar telah berhasil karena mampu merealisasi target kinerja dan kedepannya akan tetap berkomitmen untuk meningkatkan lebih baik lagi kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|------------|-----------|-----------------|
| Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD | 91,50 % | 100% | 109,2 9 |



Lanjutan...

| | | | |
|--|------|------|--------|
| Persentase penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD | 100% | 100% | 100,00 |
|--|------|------|--------|

SASARAN 4.3 MENINGKATNYA KUALITAS PENGEMBANGAN DAERAH

Capaian Kinerja sasaran strategis ini bisa dikategorikan Sangat Tinggi, diukur menggunakan indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dengan capaian kinerja 114,30% Pemerintah Kabupaten, Aceh Besar dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar untuk mendukung kualitas pengembangan daerah Untuk meningkatnya Kualitas Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten aceh Besar melakukan Inovasi Perangkat Daerah dengan mencanangkan saboh Unit saboh inovasi (satu unit satu inovasi) yang berorientasi pada pelayanan umum pemerintah dan berdampak positif bagi kepentingan masyarakat. Inovasi tersebut tercantum di Laporan inovasi Kabupaten aceh Besar tahun 2023 berikut nama dinas yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

- Dinas Sosial dengan inovasinya Program Aceh Besar Sejahtera (PRO ABES)
- Dinas Sosial dengan inovasinya program anak yatim, piatu dan yatim piatu,
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (dpmpstsp_aces) dengan inovasinya Pengembangan Perencanaan Kawasan Pariwisata Baru
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil_aces) dengan inovasinya Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (dpmpstsp_aces) dengan Inovasinya Mal Pelayanan Publik (MPP)
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (dpmg_aces) dengan Inovasinya Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDES)
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (disdikbud_aces) dengan Inovasinya Sistem Pendidikan Terpadu (SPT)



Lanjutan...

- Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo_abis) dengan Inovasinya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh Besar
- Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo_abis) dengan Inovasinya Program WEB Gampong
- ACEH BESAR (acehbesar) dengan Inovasinya Fasilitas Usaha Mikro Kecil dalam Sertifikasi dan Izin Edar Obat Tradisional.
- Dinas Pangan (dinas pangan_abis) dengan Inovasinya Gelar Pangan Murah dan DEMO JUS BUAH DAN SAYUR

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|--------|-----------|-----------------|
| Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | 10% | 11,43% | 114,30 |

SASARAN 4.4 MENINGKATNYA KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori Rendah. kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 57.45% dimana Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 mendapat nilai skala 32,17 mengalami penurunan dimana di tahun 2021 (68,46) ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Aceh besar belum optimal dalam penguatan sistem manajemen SDM, assessment pegawai baru dilakukan pada sebagian pegawai, ukuran kinerja individu belum sepenuhnya mengacu kepada kinerja organisasi serta belum menerapkan kebijakan sistem merit dan manajemen talenta.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Indeks Profesionalitas ASN | 56,00 Indeks | 32,17 Indeks | 57,45 |



Lanjutan...

SASARAN 4.5 BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan 4 indikator dengan kategori Rendah. kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 50,17 dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar telah mencapai target Kinerja dan 23 Kecamatan telah mencapai target yaitu Cakupan pelayanan umum pemerintahan di tingkat kecamatan 99,83 %, capaian kinerja terhadap 603 desa. namun belum adanya data Jumlah perizinan dan Persentase pengunjung perpustakaan per tahun dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pertanian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--|-----------|-----------|-----------------|
| Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan | 79,84 % | 80,53% | 100,86 |
| Jumlah perizinan | 3608 Unit | Unit | 0,00 |
| Persentase pengunjung perpustakaan per tahun | 2,55% | -% | 0,00 |
| Cakupan pelayanan umum pemerintahan di tingkat kecamatan | 604 Desa | 603 Desa | 99,83 |

SASARAN 4.6 MENINGKATNYA TATA KELOLA KELEMBAGAAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SERTA LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK



Lanjutan...

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan kategori sangat tinggi. Dengan capaian kinerja 105,03 %. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar telah bisa merealisasikan target kinerja namun belum mampu merealisasikan target RPD atau Nasional, melalui program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan kegiatannya: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatannya: Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatannya: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatannya: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana program dan kegiatan tersebut mampu meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik yang mana di tahun 2022 Kabupaten Aceh Besar mendapat nilai Implementasi SPBE 1,85 dibanding tahun 2021 (-).

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|-------------|-------------|-----------------|
| Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | 1,79 Indeks | 1,88 Indeks | 105,03 |

5. Meningkatkan Infrastruktur wilayah dan tata kelola lingkungan

Untuk meningkatkan Infrastruktur wilayah dan tata kelola lingkungan di hitung dengan indikator PDRB ADHB pada tahun 2022 indikator PDRB ADHB menurut lapangan usaha (juta Rupiah) mengalami kenaikan 1.358.386 mencapai 15.381.864 dibanding dengan tahun sebelumnya hanya mencapai 14.023.478, sehingga target yang ditentukanpun bisa terealisasi. guna untuk meningkatkan Infrastruktur wilayah dan tata kelola lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan 3 sasaran dan 6 indikator sasaran.



Lanjutan...

SASARAN 5.1 MENINGKATNYA AKSESIBILITAS ANTAR WILAYAH

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan kategori tinggi. Dengan capaian kinerja 84,13 % sebagai leading sector Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar melalui Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatannya: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan panjang jalan yang dibangun 1 KM, panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan 5 KM, panjang jalan yang direhabilitas 7 KM, panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin 2KM, panjang jembatan yang dibangun 15 M, panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin 30 M, panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi/terrekonstruksi akibat bencana 0,5KM dan panjang jalan strategis desa yang direkonstruksi 2 KM dan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dengan programnya: Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) program dan kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatnya aksesibilitas antar wilayah.



| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--|---------|-----------|-----------------|
| Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik | 41,60 % | 35,00% | 84,13 |

SASARAN 5.2 MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan 4 indikator dengan kategori tinggi. Dengan capaian kinerja 90,05 %. Untuk meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Besar melalui program Program Pengelolaan persampahan dengan capaian kinerjanya 33,09% dengan kegiatan pengelolaan sampah, Program

Lanjutan...

Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh), Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan capaian kinerjanya 15%, Program, Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatannya: pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan kegiatannya: pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten/kota dengan melakukan pembinaan terhadap 20% kelompok masyarakat .

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|--------------|--------------|-----------------|
| Persentase timbulan sampah yang tertangani | 33,09 % | 55,00% | 166,21 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 75,70 Indeks | 71,59 Indeks | 94,57 |
| Ketaatan terhadap RTRW | 87,00 % | 91,00% | 104,60 |
| Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Konstruksi | 34,10 % | -1,77% | -5,19 |
| SASARAN 5.3 OPTIMALISASI REFORMASI AGRARIA | | | 90,05 |

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan kategori Sangat Tinggi Dengan capaian kinerja 129,28% dimana ada 4 kasus fasilitasi mediasi yang masuk Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dapat menyelesaikan dalam bentuk mediasi.

Lanjutan...

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--|---------|-----------|-----------------|
| Persentase Fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan | 77,35 % | 100% | 129,28 |

6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dihitung menggunakan indikator Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan 4(empat) sasaran dan 5 (lima) Indikator Sasaran walaupun Pertumbuhan sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah capaian kinerjanya sangat rendah tapi di 3 indikator lainnya mencapai kinerja dengan nilai tinggi dan sangat tinggi khususnya di Pertumbuhan sub sector penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai 915,10%.

SASARAN 6.1 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PERIKANAN

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Pertumbuhan sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kategori Sangat rendah Dengan capaian kinerja 48,76% Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatannya: pembangunan prasarana pertanian seperti 10unit jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara, 5unit embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar melalui kegiatannya: Program Pengelolaan Perikanan Tangkap mampu memproduksi 981 Ton perikanan tangkap dengan tersedianya 2 unit jumlah sarana dan perikanan, 5 unit prasarana usaha perikanan tangkap , tangkap Program Pengelolaan Perikanan



Lanjutan...

Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, namun program dan kegiatan tersebut belum memberikan dampak dalam meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di Kabupaten Aceh Besar.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|--------|-----------|-----------------|
| Pertumbuhan sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | 4,04% | 1,97% | 48,76 |

SASARAN 6.2 MENGEMBANGKAN SEKTOR EKONOMI MIKRO

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah dengan kategori Sangat rendah Dengan capaian kinerja 45,95% Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar melalui Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Dengan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin 34,36 Persen dengan kegiatannya: Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota namun program dan kegiatan tersebut belum memberikan dampak pengembangan sektor ekonomi mikro di Kabupaten Aceh Besar.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--|--------|-----------|-----------------|
| Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah | 5,92% | 2,72% | 45,95 |



Lanjutan...

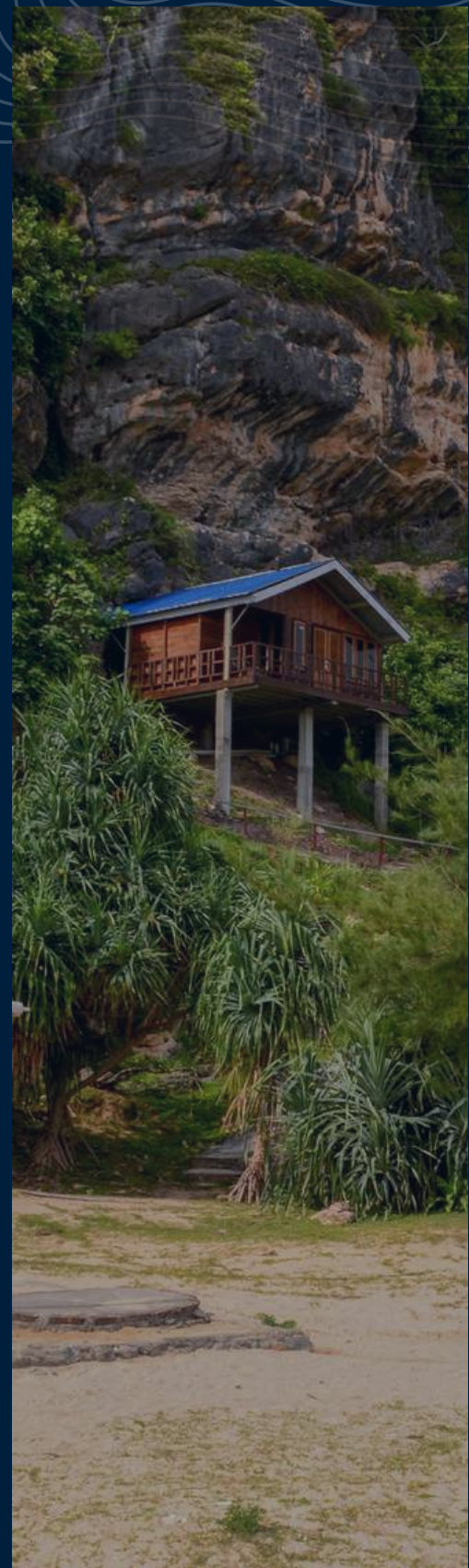
SASARAN 6.3 MENINGKATKAN KONTRIBUSI PARIWISATA

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Pertumbuhan sub sector penyediaan akomodasi dan makan minum dengan kategori Sangat Tinggi Dengan capaian kinerja 915,10%. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatannya: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan mengadakan Pelatihan Manajemen Kepariwisata terhadap 61 Orang, Pelatihan Manajemen Kepariwisata, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan kegiatannya: Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan adanya 5 unit Sarana dan Prasarana yang Dikelola di Objek Wisata, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota ada 3 lokasi Destinasi Pariwisata yang dikembangkan. program dan kegiatan tersebut telah memberikan dampak peningkatkan kontribusi pariwisata di Kabupaten Aceh Besar.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|--------|-----------|-----------------|
| Pertumbuhan sub sektor penyediaan akomodasi dan makan minum | 3,51% | 32,12% | 915,10 |

SASARAN 6.4 MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan 2 indikator dengan kategori Sangat Tinggi Dengan capaian kinerja 97,44%. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar melalui program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang memfasilitasi 230 Pelaku Usaha untuk Pengembangan Iklim Investasi, Program Promosi Penanaman Modal yang melibatkan 111 Pelaku usaha / PMDN dan PMA yang berinvestasi, Program Pelayanan Penanaman



Lanjutan...

Modal dimana ada 3100 pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. program dan kegiatan tersebut telah memberikan dampak dalam menciptakan iklim investasi di Kabupaten Aceh Besar.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| Jumlah Nilai Investasi | 1,70 Triliyun | 1,46 Triliyun | 85,88 |
| Pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor | 4,00% | 4,36% | 109,00 |

7. Optimalisasi Ketertiban dan ketentraman umum

97,44

Untuk menunjang optimalisasi Ketertiban dan ketentraman umum dihitung dengan persentase pelanggaran qanun yang tertangani Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menetapkan 4 (empat) sasaran dan 4(empat) Indikator Sasaran

SASARAN 7.1 PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Jumlah Organisasi Masyarakat, LSM, OKP dengan kategori Sangat Tinggi Dengan capaian kinerja 100 %. dalam upaya Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Aceh Besar dalam memberantas narkoba dan penyakit sosial di masyarakat dengan melakukan sosialisasi narkoba yang dilaksanakan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Montasik dan Kecamatan Darul Imarah, dengan peserta 3 (tiga) orang per gampong.



Lanjutan...

Modal dimana ada 3100 pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Program dan kegiatan tersebut telah

memberikan dampak dalam menciptakan iklim investasi di Kabupaten Aceh Besar.

SASARAN 7.2 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Persentase parpol yang mendapatkan kursi dengan kategori Tinggi Dengan capaian kinerja 81,82 %. Dimana angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Aceh Besar Sangat tinggi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Aceh Besar mengadakan sosialisasi untuk memberkan pemahaman kepada khususnya para pemilih pemula dan perempuan.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--|-----------|-----------|-----------------|
| Jumlah Organisasi Masyarakat, LSM, OKP dalam memberantas narkoba dan penyakit sosial di masyarakat | 246 Ormas | 246 Ormas | 100,00 |



| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--|---------|-----------|-----------------|
| Persentase parpol yang mendapatkan kursi | 55,00 % | 45,00% | 81,82 |

Lanjutan...

SASARAN 7.3 MENINGKATNYA PENEGAKAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Persentase penanganan kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (TRIBUMTRAMAS) dengan kategori sangat tinggi dengan capaian kinerja 109,64%.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|--|---------|-----------|-----------------|
| Persentase penanganan kasus gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (TRIBUMTRAMAS) | 90,00 % | 98,68 | 109,64 |

SASARAN 7.3 MENINGKATNYA PENEGAKAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM

Capaian Kinerja sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator Indeks ketahanan daerah dengan kategori Tinggi Dengan capaian kinerja 80,49 %. Namun belum mampu merealisasi target kinerja dan target RPD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar melalui Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatannya: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan kegiatannya: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar melalui Program Penanganan Bencana dengan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Program dan kegiatan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar berupaya untuk meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana di Kabupaten Aceh Besar.

Lanjutan...

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Indeks ketahanan daerah | 0,41 Indeks | 0,33 Indeks | 80,49 |





Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 berdasarkan RPJM Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui pengukuran terhadap 33 (tiga puluh tiga) sasaran dan 69 (enam puluh sembilan) Indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dianalisis penilai rata-rata kumulatif, maka pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masuk dalam kategori Sangat Tinggi dengan nilai capaian 92,52%. Sedangkan Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 berdasar RPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui pengukuran terhadap 35 (tiga puluh lima) sasaran dan 54 (Lima Puluh Empat) Indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dianalisis penilai rata-rata kumulatif, maka pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masuk dalam kategori Sangat Tinggi dengan nilai capaian 98,45 %, namun jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2022 dengan capaian Kinerja Tahun 2023 hanya terdapat 23 sasaran yang masih dilaksanakan seperti daftar di bawah ini:

| NO | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN 2022 | CAPAIAN 2023 |
|----|--|--------------|--------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran dan Al-Hadist serta Ijma' dan Qiyas | 956,085 | 90,63 |
| 2 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan dayah | 162,2 | 132,89 |
| 3 | Menguatnya tatanan ekonomi syari'ah | 0,42 | 0 |
| 4 | Meningkatnya kualitas pendidikan | 0 | 98,67 |
| 5 | Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan | 0 | 55,54 |
| 6 | Meningkatnya prestasi olahraga dan kepemudaan | 103,95 | 80,8 |
| 7 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | 132,66 | 99,87 |
| 8 | Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan | 20 | 100,08 |
| 9 | Meningkatnya kesejahteraan PPKS | 5,18 | 0 |
| 10 | Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan bertanggung jawab | 68,318 | 88,19 |
| 11 | Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas | 74,82 | 16,67 |
| 12 | Meningkatnya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat | 188,418 | 101,02 |
| 13 | Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan | 60,22 | 90,05 |
| 14 | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana | 88,75 | 80,49 |

Lanjutan...



| | | | |
|----|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 15 | Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami | 38,86 | 0 |
| 16 | Meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan | 107,9 | 48,76 |
| 17 | Mengembangkan sektor ekonomi mikro | 0 | 45,95 |
| 18 | Meningkatkan kontribusi pariwisata | 5,97 | 915,1 |
| 19 | Meningkatkan ketahanan pangan | 90,78 | 96,45 |
| 20 | Menurunnya angka pengangguran | 95,7 | 15,56 |
| 21 | Meningkatnya kesempatan kerja | 85,5 | 105,97 |
| 22 | Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah | 143,56 | 84,13 |
| | | 110,4223 182 | 106,673 6364 |

Realisasi Anggaran SKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023

| NO | SKPD | ANGGARAN (Rp.) | ANGGARAN REVISI / PERUBAHAN (Rp.) | REALISASI | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|--------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | FISIK (%) | KEUANGAN (Rp.) | KEUANGAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KABUPATEN ACEH BESAR | | 1.771.311.599.230 | 1.807.075.434.841 | 85,80 | 1.704.477.463.108 | 94,32 |
| 1 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 7.151.617.839 | 31.447.230.256 | 92,14 | 30.873.988.479 | 98,18 |
| 2 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 8.155.942.490 | 7.904.011.890 | 100,00 | 7.183.178.695 | 90,88 |
| 3 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 638.281.354.784 | 653.812.061.373 | 96,50 | 630.619.916.387 | 96,45 |
| 4 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 10.863.447.883 | 9.581.389.706 | 70,02 | 8.224.534.340 | 85,84 |
| 5 | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN | 15.923.536.029 | 15.852.579.229 | 79,18 | 11.617.421.443 | 73,28 |
| 6 | DINAS PARAWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 9.627.128.833 | 9.466.953.183 | 91,92 | 8.762.142.405 | 92,56 |
| 7 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 6.707.565.986 | 7.255.347.841 | 89,63 | 6.118.598.216 | 84,33 |
| 8 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5.309.752.912 | 4.927.158.073 | 87,36 | 4.031.648.773 | 81,82 |
| 9 | DINAS KESEHATAN | 203.873.721.109 | 210.109.892.075 | 95,11 | 197.342.478.775 | 93,92 |
| 10 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 12.802.317.387 | 14.119.784.887 | 72,94 | 13.632.677.200 | 96,55 |
| 11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 13.781.121.788 | 13.812.021.139 | 82,69 | 12.737.531.753 | 92,22 |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 12 | DINAS PANGAN | 5.535.460.100 | 4.918.917.187 | 92,54 | 4.221.603.528 | 85,82 |
| 13 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 104.447.175.976 | 104.999.013.186 | 87,01 | 97.522.731.864 | 92,88 |
| 14 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG | 7.159.927.977 | 6.875.142.803 | 86,18 | 6.552.262.313 | 95,30 |
| 15 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 8.826.152.773 | 7.636.838.390 | 87,57 | 6.667.170.368 | 87,30 |
| 16 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 359.413.600.192 | 357.663.458.852 | 92,87 | 347.782.172.309 | 97,24 |
| 17 | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | 11.049.875.362 | 9.200.976.162 | 93,93 | 8.706.180.113 | 94,62 |
| 18 | DINAS PERHUBUNGAN | 8.717.435.828 | 7.592.732.819 | 76,07 | 6.336.979.255 | 83,46 |
| 19 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 4.377.112.034 | 4.077.878.534 | 83,33 | 3.635.893.184 | 89,16 |
| 20 | DINAS PERTANAHAN | 3.175.317.350 | 2.901.335.047 | 58,35 | 2.129.076.776 | 73,38 |
| 21 | DINAS PERTANIAN | 52.582.130.739 | 44.584.362.893 | 76,27 | 38.350.822.764 | 86,02 |
| 22 | DINAS PPKB, PP dan PA | 18.353.132.624 | 17.861.034.404 | 83,30 | 14.690.371.555 | 82,25 |
| 23 | DINAS SOSIAL | 13.661.551.486 | 12.287.863.075 | 96,09 | 11.382.611.553 | 92,63 |
| 24 | DINAS SYARIAT ISLAM | 12.235.461.627 | 12.536.283.032 | 89,61 | 11.033.238.673 | 88,01 |
| 25 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 9.004.484.936 | 8.394.364.893 | 85,05 | 6.995.991.238 | 83,34 |
| 26 | INSPEKTORAT | 11.691.001.688 | 11.566.128.292 | 87,54 | 10.493.787.216 | 90,73 |
| 27 | KECAMATAN PULO ACEH | 1.666.319.524 | 1.586.871.024 | 95,23 | 1.515.131.325 | 95,48 |

Lanjutan:..

| | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|-------|
| 28 | KECAMATAN BAITUSSALAM | 2.435.167.739 | 2.158.055.239 | 92,59 | 1.935.276.580 | 89,68 |
| 29 | KECAMATAN BLANG BINTANG | 2.589.183.692 | 2.370.515.092 | 94,15 | 2.217.669.055 | 93,55 |
| 30 | KECAMATAN DARUL IMARAH | 2.706.020.219 | 2.706.020.219 | 98,36 | 2.529.053.311 | 93,46 |
| 31 | KECAMATAN DARUL KAMAL | 2.174.266.137 | 2.363.626.137 | 98,28 | 2.250.346.313 | 95,21 |
| 32 | KECAMATAN DARUSSALAM | 2.758.335.732 | 2.425.970.807 | 76,75 | 2.193.032.027 | 90,40 |
| 33 | KECAMATAN INDRAPURI | 2.822.926.309 | 2.477.547.206 | 79,19 | 2.226.530.078 | 89,87 |
| 34 | KECAMATAN INGIN JAYA | 2.938.005.663 | 2.896.559.963 | 98,92 | 2.677.761.144 | 92,45 |
| 35 | KECAMATAN KOTA JANTHO | 1.978.137.375 | 1.894.441.775 | 93,19 | 1.814.215.443 | 95,77 |
| 36 | KECAMATAN KREUNG BARONA JAYA | 2.413.388.582 | 2.318.452.464 | 95,00 | 2.153.293.099 | 92,88 |
| 37 | KECAMATAN KUTA BARO | 2.655.977.695 | 2.569.820.895 | 93,07 | 2.464.277.425 | 95,89 |
| 38 | KECAMATAN KUTA COT GLIE | 1.974.443.683 | 1.791.544.175 | 91,54 | 1.695.020.292 | 94,61 |
| 39 | KECAMATAN KUTA MALAKA | 1.662.852.779 | 1.691.689.218 | 97,07 | 1.503.919.097 | 88,90 |
| 40 | KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH | 1.611.859.535 | 1.611.859.535 | 87,06 | 1.403.279.557 | 87,06 |
| 41 | KECAMATAN LEUPUNG | 1.599.222.435 | 1.599.222.435 | 98,00 | 1.470.748.053 | 91,97 |
| 42 | KECAMATAN LHOKNGA | 2.004.106.119 | 2.004.108.119 | 80,90 | 1.463.282.478 | 73,01 |
| 43 | KECAMATAN LHOONG | 1.778.956.000 | 1.607.254.000 | 98,41 | 1.499.808.526 | 93,31 |
| 44 | KECAMATAN MESJID RAYA | 1.821.704.499 | 1.821.704.499 | 87,80 | 1.660.587.236 | 91,16 |
| 45 | KECAMATAN MONTASIK | 2.755.188.127 | 2.373.911.927 | 100,00 | 2.223.690.871 | 93,67 |

Lanjutan...



| | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|-------|----------------|-------|
| 46 | KECAMATAN PEUKAN BADA | 2.937.010.525 | 2.863.495.815 | 92,28 | 2.537.844.561 | 88,63 |
| 47 | KECAMATAN SEULIMEUM | 2.670.039.085 | 2.483.699.485 | 95,88 | 2.412.582.155 | 97,14 |
| 48 | KECAMATAN SIMPANG TIGA | 1.915.992.590 | 1.861.750.540 | 91,86 | 1.839.217.367 | 98,79 |
| 49 | KECAMATAN SUKA MAKMUR | 2.160.362.614 | 2.032.859.614 | 98,92 | 1.976.841.011 | 97,24 |
| 50 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 36.930.825.497 | 41.100.894.327 | 95,83 | 40.015.410.114 | 97,36 |
| 51 | SATPOL PP DAN WH | 10.240.777.449 | 13.376.088.575 | 68,77 | 11.962.958.748 | 89,44 |
| 52 | SEKRETARIAT BAITUL MAL | 17.277.561.687 | 13.976.758.791 | 92,31 | 12.482.721.588 | 89,31 |
| 53 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN | 33.348.435.357 | 34.999.985.357 | 67,08 | 30.137.710.969 | 86,11 |
| 54 | SEKRETARIAT DPRK | 44.041.328.498 | 48.289.292.192 | 68,24 | 45.910.823.827 | 88,07 |
| 55 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH | 1.858.920.805 | 1.838.920.805 | 80,53 | 1.525.743.732 | 82,97 |
| 53 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH | 1.816.314.053 | 1.619.521.872 | 94,76 | 1.554.162.337 | 95,96 |
| 57 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA | 2.754.662.367 | 2.754.662.089 | 70,97 | 2.408.658.265 | 87,44 |
| 58 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 8.705.981.149 | 8.223.618.649 | 76,34 | 5.171.117.349 | 62,88 |

Sumber data dari RFK triwulan IV Tahun 2023 Kabupaten Aceh Besar

Realisasi Pendapatan Menurut jenis Pendapatan

Rincian target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023



Rincian Realisasi Menurut Jenis Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023

| | ANGGARAN | SISA ANGGARAN | |
|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI |
| BELANJA DAERAH | 1.807.075.434.841 | 94,66 | 1.710.603.371.469,01 |
| BELANJA OPERASIONAL | 1.124.740.021.559 | 92,44 | 1.039.718.488.399,00 |
| BELANJA MODAL | 104.679.780.933 | 91,05 | 95.315.206.876,00 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.500.000.000 | 30,66 | 459.841.000,00 |
| BELANJA TRANFER | 576.155.632.349 | 99,82 | 575.109.835.194,00 |

Sumber Data : Bidang Akuntansi BPKD Kab. Aceh Besar

Lanjutan...

PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023

100%

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 60.963.390.653,30

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Selama tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berhasil memperoleh penghargaan meliputi:

- Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, SSTP, MM, yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kabupaten Aceh Besar, Drs Sulaimi MSi, didampingi Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali SPd MSi kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kali adalah untuk ke-11 kali berturut-turut, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Masmudi SE MSi Ak.CA CSFA, di Aula BPK

Perwakilan
Aceh, Kamis
(11/5/2023).



- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar berhasil meraih penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023) kategori Zona Hijau dengan predikat opini kepatuhan tinggi dengan nilai 86,18 dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM dalam hal ini diwakili Asisten III Sekdakab Jamaluddin, S.Sos., MM.

Lanjutan...

- Pj Bupati terima Penghargaan dari Kemenag RI atas partisipasi dan kontribusi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada Pengembangan dan Kebijakan positif bagi pendidikan agama islam di Madrasah dalam wilayah Aceh Besar

- Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, SSTP, MM bersama Faisal menerima penghargaan juara pertama Lomba TTG unggulan Tahun 2023 di Komplek JSC, Kota Jantho Selasa (30/5/2023) dengan Mesin pengupas-pelepeh (Decoricator) batang pisang Abaka berhasil menjadi pemenang pada lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan yang diumumkan pada Gelar TTG ke 24 Tingkat Provinsi Aceh, di Komplek Jantho Sport City (JSC), Kota Jantho, Aceh Besar, Selasa (30/5/2023)



- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendapatkan penghargaan setelah berperan aktif dalam mendukung Program prioritas nasional dibidang merek dan hak cipta tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM dalam hal ini diwakili Staf Ahli bidang Perekonomian, pembangunan dan keuangan Ir Makmun MT yang diserahkan oleh Kepala kantor Kemenkumham wilayah Aceh Dr. Drs. Meurah Budiman SH MH pada kegiatan Rapat Koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, (23/01/2024).

Activate V
Go to Setting

Inovasi Pelayanan Publik

Untuk meningkatnya Kualitas Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan Inovasi Perangkat Daerah dengan mencanangkan saboh Unit saboh inovasi (satu unit satu inovasi) yang berorientasi pada pelayanan umum pemerintah dan berdampak positif bagi kepentingan masyarakat. Inovasi tersebut tercantum di Laporan inovasi Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 secara ringkas sebagai berikut:

- **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (dpmptsp_abes) dengan inovasinya Pengembangan Perencanaan Kawasan Pariwisata Baru**

Gampong Nusa yang terletak di Kecamatan Lhoknga. Kegiatan Pengembangan Kawasan Wisata Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan konsep mengenai arah perencanaan dan pengembangan kawasan destinasi wisata di Gampong Nusa dengan berfokus pada konsep ecowisata. Secara ekonomi, potensi ini akan menjadi investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada umumnya dan masyarakat lokal Gampong Nusa pada khususnya dan kedepannya akan berlanjut dengan pembuatan Masterplan dan Booklet Perencanaan Kawasan.

- **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil_abes) dengan inovasinya Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong** pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kita sebut dengan Petugas Registrasi Gampong (PRG)masyarakat belum memiliki dokumen kependudukan seperti kepemilikan akta kelahiran, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk pemula, pelaporan kematian, dan update data kependudukan pada kartu keluarga, terupdatenya data penduduk di dalam kartu keluarga, tersedianyan buku administrasi kependudukan sehingga akan tertibnya administrasi kependudukan di gampong. Dalam hal pengurusan dokumen kependudukan di Dinas

Lanjutan...

Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat masyarakat boleh tidak datang ketempat layanan, cukup dapat di wakili oleh Petugas Registrasi Gampong. Dokumen tersebut bila sudah selesai dapat diantar langsung ke rumah penduduk oleh Petugas Registrasi Gampong.

- **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan inovasinya Mal Pelayanan Publik (MPP)**

Ada pun instansi yang menyediakan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar adalah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar, PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, Bank Aceh Syariah Cabang Jantho, Polresta Banda Aceh, Polres Aceh Besar, Imigrasi Kelas I Banda Aceh, BBPOM Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Kakemenag Aceh Besar, Mahkamah Syar'iyah Jantho, KPP Pratama Aceh Besar, BPJS Kesehatan Banda Aceh, BP3MI Aceh; dan BPN Aceh Besar.

- **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (dpmg_ abes) dengan inovasinya Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIABUMDES)**

Penerapan Aplikasi SIA BUMDes pada tiap Gampong di Aceh Besar diharapkan dapat menggugah kesadaran para pengelola BUMDesa mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang baik dan menambah wawasan kepada para pendamping desa.

- **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (disdikbud_ abes) dengan inovasinya Sistem Pendidikan Terpadu (SPT)**

Yang memiliki manfaat Terselenggaranya pendidikan yang berkarakter islami dan berbasis pada keunggulan lokal, Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada sekolah di Kabupaten Aceh Besar, Meningkatnya mutu kompetensi guru di Kabupaten Aceh Besar Keselarasan pendidikan formal dengan pendidikan berbasis dayah.



Lanjutan...

- **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh Besar dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo_abes)**

dimana adanya keterbukaan informasi ppid pelaksana di setiap unit/satuan kerja di bawah pemerintahan kabupaten aceh besar menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik, melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan menyediakan informasi serta dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

- **Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo_abes) dengan inovasinya Program WEB Gampong**

Dengan adanya Gampong.ID ini mencakup semua portal berita & informasi seluruh gampong yang ada di Aceh. Masing-masing website akan dikelola oleh setiap Gampong secara mandiri. Gampong.ID menggunakan portal Aceh CMS yang dibangun oleh Pemerintah Aceh untuk mendukung Portal Informasi Instansi Pemerintahan, Pendidikan Dayah dan Gampong. Kehadiran website gampong bukan hanya untuk menyajikan informasi publik dan kebijakan desa, tapi juga berguna dalam mempromosikan potensi kerajinan masyarakat, wisata, pertanian, kuliner, serta seni budaya yang selama ini menjadi konsumsi masyarakat setempat, sehingga bisa dinikmati oleh pihak wisatawan sampai ke mancanegara.

- **ACEH BESAR (acehbesar) dengan inovasinya Fasilitasi Usaha Mikro Kecil dalam Sertifikasi dan Izin Edar Obat Tradisional**

Inovasi ini dilaksanakan untuk meningkatnya Komunikasi Informasi dan Edukasi terkait keamanan pangan olahan yang/baik di masyarakat serta terjaminnya mutu pangan terhadap terhadap produk pangan olahan yang beredar dan sesuai ketentuan berlaku, serta pemberdayaan kader desa tentang pemahaman pangan yang baik, termasuk produk olahan yang beredar di desa.

- **Dinas Pangan (dinas pangan_abes) dengan inovasinya Gelar Pangan Murah)**



Lanjutan...

Manfaat Gelar Pangan Murah (GPM) adalah untuk menyediakan dan membantu upaya pemulihan ekonomi masyarakat rumah tangga miskin dalam penyediaan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dari pasar.

- Dinas Pangan ([dinaspangan_abes](#)) dengan inovasinya **DEMO JUS BUAH DAN SAYUR**

Inovasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara pengolahan buah dan sayur, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penerapan pemanfaatan pengolahan buah dan sayur sebagai konsumsi pangan, mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan atau menciptakan menu pengolahan buah dan sayur yang berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan terberdayanya kelompok pengolahan pangan lokal binaan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar.

- **RSUD Aceh Besar memiliki berbagai program prioritas dan inovatif**

Salah satunya adalah Fitur ADABETMAN, yang memfasilitasi transaksi layanan daftar berobat mandiri, layanan konfirmasi kehadiran, dan layanan antrian loket. Program unggulan lainnya adalah "SIDAK," yang mencakup pembuatan akte kelahiran dan pembuatan akte kematian di RSUD. Semua program ini dirancang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Layanan bridging SIMRS sebuah aplikasi yang diterapkan di sejumlah RSUD untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat (Pasien) dapat melakukan pendaftaran rawat jalan melalui Mobile JKN (Antrean online).





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 disusun sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun dan juga berperan sebagai, alat kendali, penilai kinerja dan sebagai alat pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran, tujuan dan penjabaran Strategi Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menetapkan 35 (tiga puluh lima) sasaran strategis dan 54 (lima puluh empat) indikator kinerja sasaran. Secara umum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah memperlihatkan hasil kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran srategisnya.


Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2023 ada beberapa sasaran yang belum sepenuhnya optimal dilaksanakan namun nilai capaian rata-rata adalah 100,48% dengan katagori sangat tinggi hal ini dipengaruhi oleh nilai capaian kinerja yang melampaui target pada sasaran terkait peningkatan kontribusi pariwisata dengan nilai capaian 915,10%, Adapun akibat pencapaian tidak optimal antara lain :

- Masalah aparatur daerah masih ada yang belum memahami tugas pokok, fungsi serta Kewenangan yang dimilikinya;
- Kurangnya sumber daya terutama sumber daya manusia yang berkualitas;
- Kurangnya alokasi anggaran; dan
- Masih kurangnya data yang terkumpul dilapangan.

Harapan yang hendak dicapai antara lain :

- Peningkatan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang masing-masing
- Penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan pencapaian sasaran-sasaran yang masih kurang realisasi.
- Adanya evaluasi terhadap sasaran kinerja pertriwulan per/OPD agar memudahkan dalam penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini disusun sebagai evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat menjadi dorongan dan acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di masa-masa mendatang.

Kota Jantho, 15 Maret 2024
Pj. Bupati Aceh Besar

Muhammad Iswanto, S.STP, MM